

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Hamid S. Attamimi dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta,: Kanisius.
- Ahmad Redi, 2017, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiroeddin Syarif, 1997, *Perundang-Undangan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Aziz Syamsuddin, 2015, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Bayu Dwi Anggono, 2014, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Bernard L. Tanya, 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publising.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Charles Simabura, 2011, *Parlemen Indonesia: Lintasan Sejarah dan Sistemnya*, Jakarta: Rajawali Pers.

-, 2022, *Peraturan Menteri Dalam Praktik Sistem Presidensial Setelah Perubahan UUD NRI 1945*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Claudia Geiringer, 2011, *What's the hurry? Urgency in the New Zealand Legislative Process 1987-2010*, Wellington: Victoria University Press.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dindin Abdullah Ghozali, 2015, *KADER DESA: Penggerak Prakarsa Masyarakat Desa*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Eric A. Posner & Adrian Vermeule, 2007, *Terror in the Balance: Security, Liberty and The Courts*, Great Britain: Oxford University Press.
- F.A Hayek, 1998, *Law Legislation and Liberty*, Great Britain: Routledge.
- Ian Mc Leod, 1999, *Legal Theory*, New York: Palgrave Macmillan.
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sekretariat Jendral Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
-, 2007, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
-, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bandung: Buana Ilmu Populer.
-, 2020, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Press.
- Mahfud MD, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press.

Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Yogyakarta: Kanisus.

....., 2020, *Ilmu Perundang-Undangan 1 (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 368.

....., 2020, *Ilmu Perundang-undangan 2 (Proses dan Teknik Penyusunannya)*, Yogyakarta: Kanisus.

Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.

Moh. Koesnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Niccolo Machiavelli, 1996, *Discourse on Livy*, Chicago: University of Chicago Press.

Nimatul Huda, 2016, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Nurul Qamar, Farah Syah Rezah, 2019, *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Makassar: Social Politic Genius.

Olle Tornquist, 2009, *Introduction: The Problem is Representation! Towards and Analytical Framework*, New York: Palgrave Macmillan.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

PSHK, 2021, *Legislasi Masa Pandemi: Catatan Kinerja Legislasi DPR 2020*, Jakarta: Yayasan Studi Hukum Dan Kebijakan Hukum.

Rio Christiawan, 2021, *Omnibus Law Teori dan Penerapannya*, Sinar Grafika: Jakarta.

Saldi Isra, 2018, *Pergeseran Fungsi Legislasi Edisi Kedua*, Depok: Rajawali Pers.

....., 2019, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, Depok: Rajawali Pers.

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2008, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Buku 2)*, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Select Committee on the House of Lords Constitution, 2009, *Fast-track Legislation: Constitutional Implications and Safeguards-Volume I: Report*, London: The Stationery Office.

Soehino, 2006, *Hukum Tata Negara, Teknik Perundang-undangan (Setelah Dilakukan Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua UUD NRI 1945), Edisi pertama*, Yogyakarta: BPF.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Sony Keraf, 2009, *Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius.

Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.

Zainal Arifin Mochtar, 2022, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, Yogyakarta: EA Books.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

C. Jurnal dan Makalah Hukum

Alfred Stefan & Cindy Skach, *Constitutional Frameworks and Democratic Consolidation: Parliamentarism and Presidentialism*, Journal World of Politics, Volume 46 Nomor 1.

Arnstein, 1969, *A Ladder of Citizen Participation*, Journal of the American Institute of Planners.

Cabinet Office, 2017, *Guide to Making Legislation*, United Kingdom.

Christopher M. Davis, 2015, *Expedited or Fast Track Legislative Procedures*, Congressional Research Service.

....., 2015, *Expedited Procedures in the House: Variations Enacted into Law*, Congressional Research Service.

Claudia Indriani, Sulaiman Asang, Amril Hans, 2021, *Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pali Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja*, DPMR, Volume 1 Nomor 1.

Dahlan Thaib, 2003, *Menuju Parlemen Bikameral (Studi Konstitusional Perubahan Ketiga UUD 1945)*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Dian Kus Pratiwi, Muhammad Addi Fauzani, Ahmad Ilham Wibowo, 2022, *Potensi Pengaturan Dan Praktek Pembentukan Undangundang Secara Cepat Di Indonesia (Studi terhadap Pembentukan Revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 19 Nomor 4.

Farid Wajdi, Andryan, 2020, *Prerogative of the President in About the State of Emergency (Comparison of Indonesia with the United States)*, International Journal Reglement & Society, Volume 1 Nomor 2.

Fitra Arsil, 2018, *Menggagas Pembatasan Pembentukan Dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan Dan Penggunaan Perppu Di Negara-Negara Presidensial*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 48 Nomor 1.

Ibnu Sina Chandranegara, 2021, *Pengadopsian Mekanisme Fast Track Legislation dalam mengusulkan Rancangan Undang-Undang oleh Presiden*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 21 Nomor 1.

Imran Imran, Handar Subhandi Bakhtiar, Dirga Achmad, 2020, *Legal Standing and Authority of the Regional Representative Council in the Indonesia Constitutional System*, Amsir Law Journal, Volume 1 Nomor 2.

- Jan Petrov, 2020, *The COVID-19 Emergency in the Age of Executive Aggrandizement: What Role for Legislative and Judicial Checks?*, *The Theory and Practice of Legislation* 8.
- John Ferejohn & Pasquale Pasquino, 2004, *The Law of the Exception: A Typology of Emergency Powers*, *International Journal of Constitutional Law*, Volume 2 Nomor 2.
- John Locke, 2017, *Second Treatise on Government*, Early Modern Text.
- Made Nurmawati & I Gde Marhaendra Wija Atmaja, 2017, *Jenis, Fungsi dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan*, Pengembangan Mata Kuliah Hukum Perundang-Undangan, Universitas Udayana.
- Muhammad Addi Fauzani, Fandi Nur Rohman, Dimas Firdausy, 2021, *Pemberlakuan Peraturan Dasar Sebagai Wadah Haluan Negara (Gagasan Redesain Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Prespektif Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia)*, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Volume 2 Nomor 1.
- Muhammad Yassin A, 2015, *Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUDNRI Tahun 1945*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 2 Vol. 22.
- Rosita Miladmahesi, Wicipto Setiadi, Diani Sadiawati, Handar Subhandi Bakhtiar, 2023, *The Possibility of the Implementation of Fast-Track Legislation in Indonesia*, *Padjadjaran Journal of Law*, Volume 10 Nomor 1.
- Stanley Bach, 2001, *Fast Track or Expedited Procedures: Their Purpose, Elements and Implications*, Congressional Research Service.
- Stephen Sherlock, 2005, *Indonesia's Regional Representative Assembly: Democracy, Representation and the Regions*, Centre for Democratic Institutions.

Suzie Navot, 2006, *Judicial Review of the Legislative Process*, Israel Law Review, Volume 39 Nomor 2.

Valina Singka Subekti, 2008, *Keterwakilan dan Tipe Parlemen*, Makalah Seminar Pengkajian Hukum Nasional (BPHN), Komisi Hukum Nasional Jakarta.

Victor Imanuel W Nalle, 2021, *Kritik Terhadap Perpu Di Masa Pandemi: Pembatasan Hak Tanpa Kedaruratan*, Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada. Volume 33 Nomor 1.

D. Internet

Antoni Putra, 2019, *Yang terlupakan dalam revisi UU pembentukan peraturan perundang-undangan*, <https://theconversation.com/yang-terlupakan-dalam-revisi-uu-pembentukanperaturan-perundang-undangan-127832>.

Donald Banjarnahor, 2019, *Gercep! RUU KPK Inisiatif DPR 5 September, Disahkan Hari ini*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190917110955-4-99954/gercep-ruu-kpk-inisiatif-dpr-5-september-disahkan-hari-ini>.

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020, *DPR-Pemerintah Tetap Sahkan RUU Minerba Meski Diprotes Banyak Pihak*, <https://law.ui.ac.id/dpr-pemerintah-tetap-sahkan-ruu-minerba-meski-diprotes-banyak-pihak/>.

My EIU, 2019, *National Assembly To Consider Economic Reforms*, <http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=398612423&Country=Ecuador&topic=Economy&subtopic=Forecastsub%20subtopic%20Policy+trends>.

New Zealand Parliament, 2020, *COVID-19 Recovery (Fast-track Consenting) Bill*, https://www.parliament.nz/en/pb/sc/make-a-submission/document/52SCEN-SCF BILL_99143/covid-19-recovery-fast-track-consenting-bill.

PubKGroup, 2019, *Ecuador Fast-Tracks Data Protection Law in Wake of Massive Breach*, <https://pubkgroup.com/cyber/ecuador-fast-tracks-data-protection-law-in-wake-of-massive-breach/>.

PSHK, 2019, *Pengajuan RUU di Luar Prolegnas Butuh Parameter yang Jelas*, <https://www.pshk.or.id/rr/pengajuan-ruu-di-luar-prolegnas-butuh-parameter-yang-jelas/>.

PSHK UII, 2020, *PSHK UII Akan Ajukan Uji Formil dan Uji Materiil UU Cipta Kerja*, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/350509/pshk-iii-akan-ajukan-uji-formil-dan-uji-materiil-uu-cipta-kerja>.

Rini Kustiasih, 2020, *Hanya Dibahas Tujuh Hari, DPR Sahkan RUU Mahkamah Konstitusi*, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/09/01/ruu-mk-disahkan-kepercayaan-publik-terancam>.

UK Parliament, 2020, *Coronavirus Act 2020*, <https://bills.parliament.uk/bills/2731>.

Yuli Nurhasinah, 2021, *Perjalanan Omnibus Law Hingga Menjadi UU*, <https://indonesiabaik.id/infografis/perjalanan-omnibus-law-cipta-kerja-hingga-menjadi-uu>.

